

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori Desertasi	8
1. Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i> (Teori Utama).....	8
2. Teori Negara Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	21
3. Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif sebagai	
<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi)	32
F. Kerangka Pemikiran	35
1. Peraturan-peraturan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian	35
2. Kerangka Umum Disertasi.....	41
3. Langkah-langkah Dalam Disertasi.....	43
4. Alur Kerangka Disertasi	44
G. Metode Penelitian.....	45
1. Paradigma Penelitian	45
2. Pendekatan Penelitian	46
3. Sifat Penelitian.....	46
4. Sumber Data.....	47
a. Data Sekunder	47
b. Data Primer	48
5. Metode Pengumpulan Data	49
6. Metode Analisa Data dan Bahan Hukum	50

H. Orisinilitas Penelitian	52
I. Sistematika Penulisan	57

BAB II SEJARAH PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DAN PENGATURAN TANAH

TANAH PERTANIAN DALAM BINGKAI LANDREFORM.....	60
A. Sejarah Penguasaan Tanah Pertanian di Indonesia	60
1. Masa Feodalisme	60
2. Masa Pemerintahan Kolonial	65
3. Masa Kemerdekaan	69
a. Masa Orde Lama	69
b. Masa Orde Baru	69
c. Masa Orde Reformasi	70
B. <i>Landreform</i>	71
1. Tujuan <i>Landreform</i>	75
2. Program-program <i>Landreform</i>	79
C. Batas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian	81
D. Larangan Pemilikan Tanah Pertanian secara Absentee (Guntai)	82
E. Redistribusi Tanah Pertanian	86
F. Tanah Pertanian dan Hak Atas Tanah Pertanian	90
1. Tanah Pertanian.....	90
2. Hak Atas Tanah Pertanian	93

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN

MELALUI PERBUATAN HUKUM JUAL BELI SAAT INI.....	101
A. Pengertian Yuridis Beralih dan Dialihkan Tanah Pertanian.....	101
B. Jual Beli Hak Atas Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat	102
C. Jual Beli Hukum Atas Tanah Pertanian Menurut UUPA	106
D. Kewenangan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian	107
E. Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian	110
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar	
pokok-pokok Agraria	110

2.	Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, tentang Penetapan	
	Luas tanah Pertanian	115
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, tentang Pelaksanaan	
	Pembagian Tanah dan Pemberian ganti Kerugian	117
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, tentang Perubahan	
	dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961	125
F.	Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Melalui	
	Jual Beli dihadapan PPAT.....	126
G.	Contoh Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian	
	Melalui Perbuatan Hukum Jual Beli di Hadapan PPAT di Kabupaten	
	Tegal saat ini	130
H.	Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Melalui Lelang	133
I.	Kewenangan Pejabat Lelang dalam Peralihan Hak Atas Tanah	
	Pertanian	138
J.	Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Melalui	
	Lelang	138
K.	Gambaran Umum Kabupaten Tegal dan Tanah Pertanian	
	Kabupaten Tegal	140
	1. Geografi Kabupaten Tegal	140
	2. Luas Tanah Pertanian Tahun 2011	141
	3. Luas Tanah Pertanian Tahun 2012	142
	4. Luas Tanah Pertanian Tahun 2013	142
	5. Grafik Penggunaan Lahan Pertanian Kabupaten Tegal	143
	a. Grafik Penggunaan Lahan Tahun 2011.....	143
	b. Grafik Penggunaan Lahan Tahun 2012.....	143
	c. Grafik Penggunaan Lahan Tahun 2013.....	144
	6. Jarak Dari Kecamatan ke Kecamatan di Kabupaten Tegal.....	145
	1. Tabel 1.1.1 Jarak dari Kecamatan ke Kecamatan di Wilayah	
	Kabupaten Tegal Tahun 2013 (Kilometer)	145
	7. Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Lahan dan bukan	
	pertanian tiap Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2011, 2012,	
	2013.....	146
	1. Tabel 1.2.1 Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Lahan dan ...	
	Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Ha)	148

2. Tabel 1.2.2 Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Lahan dan Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2012 (Ha)	148
3. Tabel 1.2.3 Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Lahan dan Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 (Ha)	149
8. Sensus Pertanian 2013 di Kabupaten Tegal	151
9. Jumlah Usaha Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha, Sensus Pertanian tahun 2003 dan 2013	154
10. Nilai tukar Petani Gabungan Kabupaten Tegal tahun 2013.....	164

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN PERALIHAN

HAK ATAS TANAH PERTANIAN MELALUI PERBUATAN HUKUM JUAL BELI BERKAITAN TANAH ABSENTEE.....	167
--	-----

A. Kelemahan-kelemahan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian	167
B. Contoh Kelamhan dalam Pelaksanaan Peralihan hak atas tanah Pertanian Saat ini	178

BAB V REKONSTRUKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut Pancasila	211
B. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut Undang-Undang Dasar 1945	216
C. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut TAP MPR No. IX/MPR/2001	223
D. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960	225
E. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960	226
F. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, Perlindungan lahan ... pertanian Pangan Berkelanjutan	227
G. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian yang Berkeadilan Menurut	

Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian	228
H. Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Menurut PP 41 Tahun 1964.....	
Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224	
tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian.....	
Ganti Kerugian	230
I. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Slw.	231
I.1 Analisa Hukum Putusan Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Slw.....	231
J. Perbandingan Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian di Negara	
Filipina dan Malaysia	264
1. Landreform di Filipina	264
2. Proyek Felda di Malaysia	268
K. Rekonstruksi Peralihan hak atas tanah Pertanian yang berbasis	
Nilai Keadilan	273
BAB VI PENUTUP.....	298
A. Simpulan	298
B. Saran.....	299
C. Implikasi Kegiatan Disertasi	300
Daftar Pustaka	
Lampiran	
1. Putusan No. 19/Pdt.G/2014/PN. Slw	
2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Kramat	
3. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan.	
4. Foto Copy Surat Permohonan Lelang Sukarela.	
5. Foto Copy Blangko Pertimbangan Landreform dalam rangka peralihan hak atas tanah pertanian.	
6. Foto Copy surat pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan/ penguasaan tanah.	